

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia ini memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi dan penuntasan jumlah pengangguran, mendorong akselerasi pembangunan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan menanggulangi kemiskinan. Menurut Ariani (2013, hlm.102). Melalui kewirausahaan, UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa. Perkembangan UMKM yang besar ditunjukkan oleh banyaknya jumlah unit usaha serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 pada BAB I Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Lalu pada ayat 2 menyebutkan bahwa, Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dan koordinasi dan pengendalian.

Peneliti telah melakukan riset mengenai data jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dari hasil riset tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kecamatan Pasar Rebo

Tahun	Jumlah UMKM
2018	806 usaha
2019 (data terkini)	1160 usaha

Sumber: Data Kecamatan Pasar Rebo April 2019

Data tersebut selanjutnya dibagi menjadi 5 kelurahan yang ada di kecamatan Pasar Rebo.

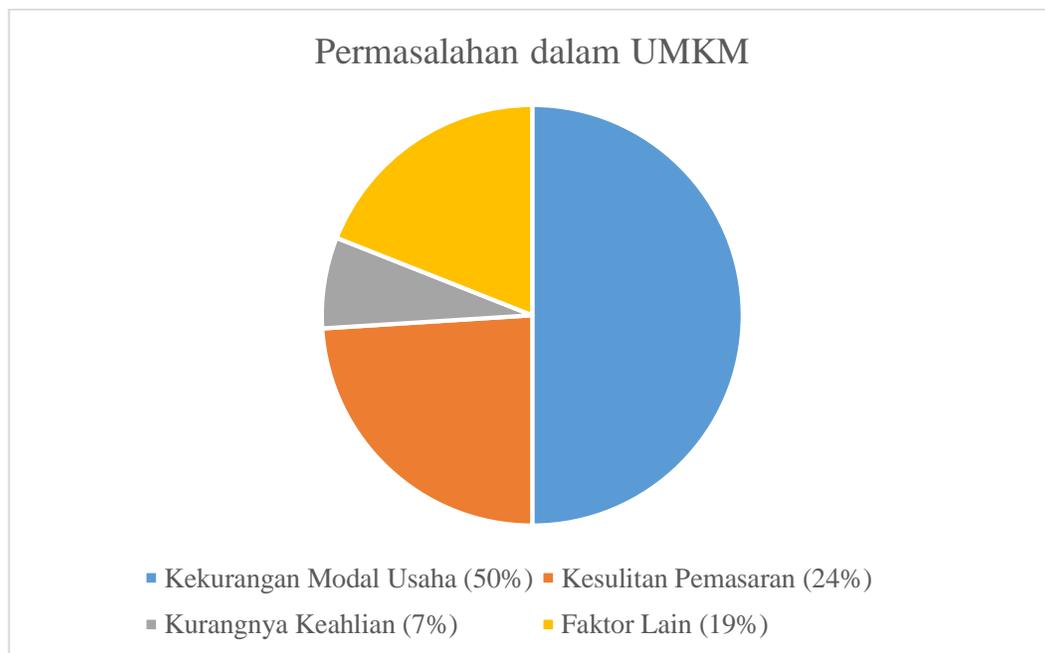
Tabel 2. UMKM di 5 Kelurahan di Kecamatan Pasar Rebo April 2019

Kelurahan	Kode Pos	Jumlah UMKM
Baru	13780	226 usaha
Cijantung	13770	228 usaha
Gedong	13760	269 usaha
Kalisari	13790	231 usaha
Pekayon	13710	206 usaha

Sumber: Data Kecamatan Pasar Rebo April 2019

Peneliti juga melakukan riset di Kantor Walikota Jakarta Timur. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jakarta Timur, didapatkan hasil bahwa masalah paling utama pada pelaku UMKM adalah masalah modal, selain masalah modal, masalah lain yang dihadapi pelaku UMKM adalah masalah mengenai lokasi usaha, perizinan usaha, dan pembukuan mengenai keuangan usaha. Berdasarkan kejadian dilapangan pelaku UMKM yang terkendala pada lokasi usaha dapat berdampak langsung terhadap perizinan, dikarenakan mereka yang tidak memiliki lokasi usaha banyak yang menjadikan trotar sebagai lokasi usaha mereka, tentu saja hal tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah mengenai trotoar sebagai zona steril dari aktivitas perdagangan. Selanjutnya, pada masalah perizinan, pelaku UMKM banyak yang tidak memiliki izin untuk mendirikan usaha dikarenakan mereka takut akan dikenakan pajak. Lalu, pelaku UMKM belum memahami betul mengenai pentingnya pembukuan dalam usaha mereka, hal ini disebabkan karena tidak memiliki informasi keuangan yang transparan dan terorganisir.

Secara garis besar masalah tersebut sama dengan data yang yang dirilis oleh Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), yang ditunjukkan melalui gambar berikut.



Gambar 1. Data Permasalahan pada UMKM Tahun 2015

Sumber : Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef)

Diagram diatas menunjukkan bahwa masalah yang paling banyak dihadapi para pelaku UMKM adalah masalah kekurangan modal usaha yaitu sebesar 50%, selain kekurangan modal usaha, masalah lainnya yang dihadapi para pelaku UMKM adalah sulitnya memasarkan produk atau jasa yang mereka jual kepada masyarakat, sebesar 24% pelaku UMKM mengalami masalah tersebut. Kurangnya keahlian dalam menjalankan bisnis UMKM sebesar 7%, hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman bisnis. Sisanya adalah factor-faktor lain sebesar 19%.

Menurut David Smallbone dan Freidrieke Welter, (2001) Negara adalah factor utama yang mempengaruhi sifat dan laju pengembangan UMKM, bahwa banyak perusahaan bertahan hidup dan kadang-kadang tumbuh tanpa bantuan pemerintah karena mereka memiliki kreatifitas dalam memobilisasi sumber daya serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, namun banyak juga perusahaan yang tidak mampu berkembang.

Selain kebijakan pemerintah pada UMKM, cara lain yang dapat meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya

dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Menurut Muraga & John (2015) dengan literasi keuangan yang baik pengusaha mampu untuk menggunakan kemampuan di bidang keuangan dalam pengambilan berbagai keputusan yang tepat untuk perusahaan mereka. Menurut Muliaman (2016), kondisi masyarakat Indonesia yang hanya memiliki pengetahuan keuangan sebesar 21,84% menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang disebabkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat sejalan dengan tingkat melek keuangan dan kedekatan masyarakat terhadap akses keuangan.

Cara lain dalam mengatasi masalah pada UMKM adalah dengan cara melakukan inovasi dalam berbisnis. Inovasi dalam dunia usaha berkaitan erat dengan upaya pengusaha untuk menciptakan hasil yang lebih baik lewat produk baru, pelayanan baru, perubahan proses operasional dan manajerial, perubahan organisasi bahkan perubahan di segmen pasar. Menurut Lee, C & Lee, C (2007), perusahaan kecil perlu melakukan inovasi, dimana perusahaan yang lebih muda lebih mungkin berinovasi dibandingkan perusahaan yang lebih tua. Perusahaan kecil dengan banyak karyawan juga lebih mungkin berinovasi. Menurut Sukirno (2012, hlm. 435) mengatakan bahwa inovasi yang dilakukan oleh adanya kegiatan kewirausahaan merupakan sebuah keharusan yang akan mempengaruhi sektor ekonomi sebuah negara.

Setelah memahami uraian diatas, peneliti akan melihat bagaimana pengaruh dari peran pemerintah, inovasi dan literasi keuangan terhadap pengembangan usaha khususnya pada UKM, maka judul yang diambil pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Peran Pemerintah, Inovasi dan Literasi Keuangan Terhadap Pengembangan UMKM”**, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku UKM mengenai pentingnya pengembangan usaha dalam menjalankan bisnis mereka, sehingga mereka dapat hidup lebih sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah peran pemerintah berpengaruh terhadap pengembangan usaha.
- b. Apakah inovasi berpengaruh terhadap pengembangan usaha.
- c. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap pengembangan usaha.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi pengaruh peran pemerintah terhadap pengembangan usaha.
- b. Mengidentifikasi pengaruh inovasi terhadap pengembangan usaha.
- c. Mengidentifikasi pengaruh literasi keuangan terhadap pengembangan usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis
Untuk para akademis dan peniliti-peneliti selanjutnya dan pihak lainnya, penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh kebijakan pemerintah, inovasi dan literasi keuangan terhadap pengembangan usaha.
- b. Kegunaan praktis
Sebagai bahan masukan bagi para pelaku UKM sehingga dapat menjalankan usaha dengan sebaik mungkin agar usaha yang mereka jalankan dapat berkembang.